

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN JALAN MELALUI PROSES MUSYAWARAH DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Purnadi¹, Agus Sya'bani Arlan², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ptpurnadi@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam kegiatan pembangunan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Penelitian ini dilakukan di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menyoroti masalah ketergantungan pada jalan rusak, perbaikan tambal sulam yang tidak efektif, dan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menentukan prioritas perbaikan jalan melalui musyawarah desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses prioritas. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh secara purposive dari 12 informan, dan kredibilitasnya diperiksa melalui observasi, triangulasi, dan member checking. Temuan menunjukkan partisipasi masyarakat yang kurang optimal dalam perbaikan jalan melalui musyawarah desa. Meskipun ada partisipasi yang memadai dalam pelaksanaan program berdasarkan sumber daya manusia, aspek-aspek seperti frekuensi pertemuan dan kepuasan terhadap hasil perbaikan jalan masih kurang. Faktor pendukung meliputi upaya dari pihak desa dan keterlibatan masyarakat, sementara kendala finansial dan kondisi alam menjadi hambatan. Saran meliputi dorongan untuk partisipasi musyawarah dan evaluasi desa, peningkatan transparansi keuangan, dan pendorong keterlibatan masyarakat yang kritis dalam inisiatif pembangunan desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Musyawarah Desa

ABSTRAK

Community participation plays a vital role in rural development activities, encompassing decision-making, program implementation, monitoring, evaluation, and utilization of outcomes. This research was conducted in Rintisan Village, Danau Panggang District, Hulu Sungai Utara Regency, focusing on issues such as dependency on deteriorating roads, ineffective patching repairs, and threats to community well-being. The objective was to determine road repair priorities through village deliberations and identify factors influencing the prioritization process. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data were purposively gathered from 12 informants, and their credibility was ensured through observation, triangulation, and member checking. Findings revealed suboptimal community participation in road repair decisions through village deliberations. While there was adequate participation in program implementation based on human resources, aspects such as meeting frequency and satisfaction with road repair outcomes were lacking. Supporting factors included efforts from village authorities and community involvement, while financial constraints and environmental conditions posed obstacles. Recommendations include promoting participation in village deliberations and evaluations, enhancing financial transparency, and encouraging critical community engagement in rural development initiatives.

Keywords: Community Participation, Village Development, Village Deliberation

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan desa menjadi tulang punggung bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat jalan adalah sarana utama yang menghubungkan mereka dengan berbagai fasilitas penting seperti sekolah, tempat kerja, dan layanan kesehatan. Namun, banyak desa, termasuk Desa Rintisan di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan serius terkait kondisi jalan

desa mereka. Desa Rintisan, yang terletak di daerah rawa, dihadapkan pada masalah utama terkait jembatan yang menghubungkan mereka dengan Kecamatan Danau Panggang. Jembatan ini, menjadi satu-satunya jalur vital bagi penduduk desa untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, namun sering mengalami kerusakan dan rawan terendam selama musim hujan. Dampaknya, sangat terasa dalam mengakses layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi di luar desa.

Meskipun telah ada upaya perbaikan, namun perbaikan yang dilakukan hingga kini hanya bersifat tambal sulam, belum memberikan solusi yang signifikan terhadap masalah tersebut. Observasi tahap awal menunjukkan adanya kendala dalam proses musyawarah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan desa yang lebih efektif. Keberadaan jembatan yang tidak memadai bukan hanya mengancam konektivitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga kesejahteraan dan potensi pembangunan desa secara keseluruhan. Guru-guru di sekolah setempat bahkan terpaksa mempertimbangkan pindah mengajar karena kesulitan mencapai sekolah akibat kerusakan jembatan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, 4, 8, dan Pasal 2)

Melihat uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Jalan Melalui Musyawarah Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”..

Dari keluhan masyarakat terkait kondisi jalan titian yang rusak, penulis menemukan beberapa masalah yang perlu ditangani:

1. Ketergantungan pada Jalan Titian yang Rusak: Masyarakat Desa Rintisan sangat bergantung pada Jembatan Titian sebagai satu-satunya akses jalan mereka ke Kecamatan Danau Panggang. Jembatan yang sering rusak dan tergenang air menghambat mobilitas masyarakat. (Sumber: kondisi akses jalan yang tidak memungkinkan, lapangan 2023)
2. Perbaikan Tambal Sulam yang Tidak Signifikan: Meskipun telah dilakukan beberapa perbaikan pada jembatan, namun hanya bersifat tambal sulam dan tidak memberikan perbaikan yang berarti. Hal ini menunjukkan kendala dalam menetapkan prioritas pembangunan desa. (Sumber: evaluasi perbaikan jalan Desa Rintisan 2023)
3. Ancaman Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kondisi jembatan yang tidak memadai mengancam kesejahteraan masyarakat Desa Rintisan. Mereka kesulitan mengakses layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di luar desa. Hal ini juga dapat menghambat potensi pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup warga. (Sumber: kondisi akses jalan yang tidak memungkinkan, 2023)

METODE

Lokasi penelitian merupakan obyek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang akan menjadi sarana dalam penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang

diperoleh. Maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu Masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Data dan sumber data diambil dari berbagai sisi yaitu data sekunder, data primer dan sumber data dari lapangan yaitu informan dsb. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik purposive. Purposive adalah strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam perbaikan jalan melalui musyawarah Desa Rintisan kurang baik, dilihat dari indikator pertama jumlah pertemuan musyawarah desa dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi pertemuan musyawarah desa hanya terjadi 3 kali, meskipun dalam wawancara pihak desa menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam setahun. Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dalam wawancara dan dokumentasi yang ada. Oleh karena itu, frekuensi pertemuan desa tidak sesuai dengan dokumentasi yang ada, dan hal ini menunjukkan kurangnya keakuratan dalam pelaporan kegiatan musyawarah desa; kedua prioritas perbaikan jalan kurang baik karena keputusan prioritas perbaikan jalan melalui musrenbangdes tidak sesuai dengan realitas. Meskipun jalan diperbaiki, namun hanya sedikit saja yang diperbaiki secara total dan sisanya sebatas tambal sulam, yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang melintasinya; ketiga Keputusan sesuai dengan kebutuhan desa kurang baik karena implementasinya kurang sesuai dengan hasil perbaikan jalan yang sebagian nya diperbaiki secara total dan sebagian jalan lagi di perbaiki hanya tambal sulam. Hal ini menyebabkan insiden di mana ada masyarakat terjatuh ke bawah jalan akibat tambalan yang terbuka; keempat keterlibatan Masyarakat dalam perbaikan cukup baik karena partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam kegiatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat kecenderungan masyarakat meminta upah dalam konteks perbaikan jalan. Hal ini dapat dianggap tidak efisien dalam pengeluaran anggaran desa; kelima partisipan dalam kegiatan kurang baik karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ada, namun disertai dengan pemberian upah. Pengerjaan yang terlihat kurang optimal, terutama pada perbaikan jembatan, karena beberapa minggu setelah perbaikan, jalan tersebut kembali mengalami banyak lubang. Perbaikan selanjutnya hanya dilakukan dengan cara tambal sulam. Metode tambal sulam pada jalan tersebut dapat menjadi potensi bahaya bagi masyarakat yang melintasinya; keenam kepatuhan waktu dan sumber daya kurang baik karena terdapat banyak bagian jalan yang masih rusak, dan masyarakat telah mengawasi serta mengkritik pelaksanaan perbaikan tersebut. Meskipun mendengar kritikan tersebut, kepala desa hanya melakukan perbaikan jalan secara tambal sulam; ketujuh frekuensi pertemuan evaluasi kurang baik karena kurangnya pertemuan evaluasi yang diadakan oleh perangkat desa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan interaksi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa terkait

evaluasi pembangunan menjadi terbatas. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa pembangunan yang sedang berlangsung masih dalam tahap perbaikan jalan dan program, sehingga masyarakat sulit memberikan evaluasi yang konstruktif karena proyek tersebut masih dalam proses. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa. Perlu diadakan pertemuan rutin antara perangkat desa dan masyarakat guna membahas kemajuan proyek dan mendapatkan masukan serta tanggapan dari warga. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; kedelapan partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena aparat desa tidak menyediakan mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat memberikan saran dan masukan terhadap proyek pembangunan. Meskipun beberapa warga ingin memberikan saran, namun tidak ada saluran yang efektif untuk melakukannya. Sebaliknya, kritik dilontarkan secara pribadi kepada kepala desa mengenai kondisi jalan yang rusak. Respons kepala desa terhadap kritik tersebut hanya sebatas melakukan tindakan tambal sulam, tanpa melakukan perbaikan secara signifikan; kesembilan masukan masyarakat mengenai perbaikan jalan kurang memuaskan. Meskipun ada usaha untuk mengatasi beberapa masalah seperti genangan air dan kerusakan jembatan, hasil perbaikan belum memberikan dampak optimal. Meski jalan telah ditinggikan untuk mengatasi banjir, masih terdapat lubang-lubang yang membuat kondisi jalan tidak aman. Keberlanjutan perbaikan jalan di Desa Rintisan perlu dievaluasi, dengan fokus pada aspek keamanan dan kepuasan masyarakat. Insiden terjatuhnya warga akibat papan tambalan yang terlepas menunjukkan bahwa ada risiko yang masih harus diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan lebih lanjut untuk mencapai tingkat keamanan yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk membuka saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar masukan masyarakat dapat lebih efektif diperoleh dan direspons dalam proses perbaikan Pembangunan; kesebelas pemanfaatan jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama bagi mereka. Meskipun jalan ini sangat penting, perbaikan yang dilakukan kurang baik. Hanya sebagian dari jalan yang diperbaiki secara menyeluruh, sedangkan sebagian lainnya hanya ditambal sulam. Keputusan untuk menggunakan tambal sulam menimbulkan kekhawatiran, karena sulit untuk menilai kekuatan atau kerentanan tambalan tersebut. Masyarakat merasa cemas, terutama pada malam hari atau saat cuaca hujan, karena kondisi jalan yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko kecelakaan; kedua belas kepuasan terhadap perbaikan jalan kurang baik. Meskipun dalam wawancara, banyak responden menyatakan kurang puas dengan hasil pengerjaannya dan memberikan nilai kepuasan sebesar 30-70%, namun hasil observasi dan dokumentasi tidak sejalan dengan kesimpulan tersebut. Kenyataannya, perbaikan jalan hanya dilakukan secara parsial, sedangkan beberapa bagian lainnya hanya ditambal dengan cara yang kurang memadai. Tambalan tersebut bahkan dapat membahayakan masyarakat yang melintasinya. Sebaiknya, diperlukan evaluasi lebih lanjut dan tindakan perbaikan yang lebih menyeluruh untuk memastikan keselamatan dan kepuasan masyarakat terkait kondisi jalan tersebut; ketiga belas ketersediaan layanan penting di desa rintisan terkait perbaikan jalan masih belum optimal. Meskipun hasil wawancara menunjukkan bahwa akses jalan terbilang mudah, hasil observasi menunjukkan bahwa jalan tersebut masih sulit dilalui saat cuaca buruk atau pada malam hari. Selain itu, hasil perbaikan yang telah dilakukan menimbulkan kesulitan bagi petugas pelayanan desa untuk melewati jalan tersebut, sehingga dapat mengancam keselamatan mereka. Faktor penghambat dari partisipasi masyarakat dalam perbaikan jalan melalui musyawarah desa rintisan ada tiga faktor yaitu pertama faktor tidak ada evaluasi kegiatan dari Masyarakat dalam Pembangunan desa rintisan; kedua faktor terkendala dana perbaikan jalan dan tanah gambut yang membuat pondasi penyangga jalan

lemah; ketiga faktor hasil perbaikan jalan kurang baik. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat dari partisipasi Masyarakat dalam perbaikan jalan melalui musyawarah desa rintisan yaitu dengan; pertama aparat desa buat pertemuan evaluasi Pembangunan desa dengan mengundang seluruh Masyarakat desa rintisan; kedua diskusikan aparat desa dengan Masyarakat mengenai kekurangan dana Pembangunan dan buat transparansi anggaran biaya desa; ketiga keluarkan dana desa Pembangunan untuk memperbaiki jalan desa rintisan Dengan gotong royong semua Masyarakat desa rintisan.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam perbaikan jalan melalui proses musyawarah desa rintisan, kecamatan danau panggang, kabupaten hulu sungai utara kurang baik, hal ini dilihat dari aspek; 1) Partisipasi pengambilan keputusan dilihat dari indikator jumlah pertemuan musyawarah desa kurang baik karena musyawarah tersebut tidak terbuka untuk masyarakat umum, dilihat dari tidak adanya undangan kepada masyarakat untuk musyawarah pembangunan desa. 2) Partisipasi pelaksanaan program dilihat dari indikator sumber tenaga cukup baik karena masyarakat yang turut serta dalam memperbaiki jalan memiliki kedisiplinan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam mematuhi jadwal pengerjaan maupun dalam menyelesaikan perbaikan jalan tepat waktu. 3) Partisipasi pemantau dan evaluasi dilihat dari indikator frekuensi pertemuan evaluasi kurang baik karena setelah penyelesaian perbaikan jalan, pihak aparat desa tidak mengadakan pertemuan evaluasi bersama masyarakat. 4) Partisipasi pemanfaatan hasil perbaikan jalan dilihat dari indikator kepuasan kurang baik karena setelah perbaikan dilakukan, masyarakat masih merasa khawatir melewati jalan tersebut. Hal ini disebabkan karena perbaikan hanya dilakukan sebagian, sementara sebagian jalan lainnya masih menggunakan metode tambal sulam yang tidak memadai

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Saputra (2021) 'Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan danau panggang kabupaten hulu sungai utara (studi kasus desa bitin, manarap, dan manarap hulu)', *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai*.
- Anonim (2016) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa', *Peraturan Menteri*.
- Anonim (2017) 'Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor5 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Desa', *Peraturan Bupati (PERBUP)*, (2), p. 51.
- Anonim (2022) 'Undang-undang Republik Indonesia Nomor2 tahun 2022 Tentang Jalan', *Peraturan Perundang-undangan*, (134229).
- Aprilia Ainnur Cahya (2016) 'Membangun kampung hijau bersinar : upaya pendampingan dalam membangun kesadaran masyarakat kampung kumuh di Bulak Banteng Lor i Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya', *Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 4(June), pp. 30–59. Available at: website: <http://digilib.uinsa.ac.id/11937/>.
- Baturangka, T., Kaawoan, J.. and Singkoh, F. (2019) 'Pembangunan berbasis masyarakat', *Jurnal Eksekutif*, 3(3), pp. 1–9.
- Drs. Moch. Solekhan, M. (2014) *Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*. 1st edn. Malang: Setara Press.
- Hadiwijoyo, S.S. dan F.D.A. (2019) *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. dan M.A. (2018) *Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta.

- I Nyoman Shuida (2016) 'Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa : Perencanaan - Penganggaran - Pelaksanaan - Pengadaan Barang dan Jasa - Pelaporan - Pembinaan dan Pengawasan', *Kemenkopmk*, p. 24. Available at: <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Buku-Bantu-Pengelolaan-Pembangunan-Desa-BAB-1-2.pdf>.
- Ibrahim (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung: CV. Alfabeta.
- Isnanto, B.A. (2023) *Prioritas Adalah Sesuatu yang Harus Diutamakan, Simak Cara Penerapannya!*, *Detik.com*. Available at: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6568678/prioritas-adalah-sesuatu-yang-harus-diutamakan-simak-cara-penerapannya> (Accessed: 8 November 2023).
- Purwandari, A.W. and -, M.- (2016) 'Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), p. 377. Available at: <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11548>.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 25th edn. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2015) *Akuntansi desa : panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Totok Mardikanto, P.S. (2013) *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. 2nd edn. Bandung: Alfabeta: Bandung.
- Wibowo (2019) *Manajemen dari fungsi dasar ke inovasi*. Depok: PT. Raja Grafindo persada.
- Yogi Pratama (2018) *Pemberdayaan dan pembangunan desa*. Riau: Draft Media.